

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PDI
PERJUANGAN**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

DPRD KOTA SALATIGA
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Berkah dalem

Om swasti astu

Namo Budaya

Salam kebajikan

Rahayu

Srir Astu Swasti Prajabyah

Yth. Sdr.Pj. Walikota

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati:

- Segenap Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga.
- Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga.
- Staf Ahli Walikota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kota Salatiga, serta para Camat, Lurah se Kota Salatiga.
- Para Direktur di lingkungan BUMD Kota Salatiga, para Rektor, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia.

MERDEKA !!!

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita sekalian dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD. dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat.

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan hakekat pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah bermuara pada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Selanjutnya hal tersebut dapat dijadikan bahan analisa untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun anggaran.

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

Setelah mencermati dan melakukan analisa secara detail terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan penting sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Perda Retribusi dan Pajak Daerah

Perluasan Digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi serta pemungutan sumber lainnya menjadi agenda mendesak dalam pembenahan ketentuan administrasi perpajakan daerah dan retribusi serta pungutan lainnya di Kota Salatiga.

2. Kebijakan optimalisasi penerimaan daerah agar diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Disamping itu juga peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penataan barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pembangunan Taman Wisata di Salatiga masih kurang optimal dan maksimal, sampai saat ini banyak pengerjaan bangunan yang masih harus dibenahi . keseriusan Pemkot terhadap pembangunan dan tindak lanjut dari upaya pengembang sangat diperlukan, sehingga tujuan pembangunan belum bisa menunjukkan manfaat yang optimal, baik dari segi penerimaan daerah maupun pemenuhan rekreasi bagi masyarakat
4. Pelaksanaan Pembangunan melalui dana kelurahan masih kurang maksimal. Hal tersebut perlu dilakukan adanya pendampingan yang serius, dan pemahaman yang sama dari LPMK selaku pelaksana kegiatan maupun pemerintah selaku penanggungjawab kegiatan. Sehingga bisa lebih meminimalisir kurang beresnya pelaksanaan kegiatan terutama dalam administrasi LPJ.
5. Sehubungan dengan adanya temuan dari BPK tentang kurangnya volume di beberapa pengerjaan infrastruktur di dinas terkait, Fraksi PDI Perjuangan menyarankan hendaknya menjadi catatan khusus bagi pihak ke 3, agar tidak terulang kembali adanya temuan kekurangan volume. Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat perlu adanya reward dan punishment terhadap kinerja pihak ke 3 agar selanjutnya pengerjaan tepat waktu, tepat anggaran dan tepat spesifikasi.
6. Dalam hal Pendidikan Fraksi PDI Perjuangan berpendapat untuk pelaksanaan PPDB hendaknya dibarengi dengan sosialisasi oleh dinas terkait ke masyarakat luas, terkait baik masalah kriteria jalur masuk, zonasi dan berbagai fasilitas penunjang yang bisa ditempuh calon peserta didik.khusus untuk Pendidikan dasar

perlu adanya kajian dan Analisa bagaimana daya Tarik sekolah Negeri sehingga fenomena sekolah negeri kekurangan murid bisa diatasi.

7. Upaya menuju zero stunting 2024, jangan hanya jargon belaka. Sinergitas dari seluruh stake holder juga. Pemahaman yang utuh dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Program super Tangguh yang dicanangkan Pemkot jangan indah diwaktu launching tetapi keberlangsungannya dan kontinuitas perlu dikawal, terutama yang menyangkut penanganan stunting.
8. Kasus-kasus bullying yang selama ini terjadi perlu adanya penanganan yg lebih serius. Pemilihan cara dan metode penanganan bullying tidak akan selesai dengan hanya sekedar menutupi kasus tetapi perlu Tindakan nyata yang terencana dan sistematis, sehingga mana kala terjadi kasus bisa selesai secara tuntas dan tidak menimbulkan masalah secara Psikologis di kemudian hari.

Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,

Fraksi PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa gagasan sbb :

1. Didirikannya museum Olah Raga, Salatiga yang mempunyai fungsi sebagai Kota olah raga, baik olah raga prestasi, Pendidikan maupun rekreasi. Gagasan ini sebagai bentuk apresiasi dibidang Olah Raga atas berbagai prestasi dimasa lampau maupun kini, juga selama ini pelaksanaan realisasi anggaran bidang ini tidak ada indikasi temuan.
2. Peyertaan modal yang sudah dilakukan Pemerintah Kota ke BUMD hendaknya dibarengi dengan tetap melaksanakan pengawasan yang lebih intens, sehingga penggunaan modal yang dimaksud bisa lebih transparan, akuntabel dan tepat pengunaannya. Selain itu fraksi PDI Perjuangan berpendapat dalam hal penyertaan modal tidak hanya berupa uang saja tetapi penyertaan asset juga.
3. Fraksi PDI Perjuangan menyarankan pada RSUD untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien, servis ditingkatkan selain itu perlu adanya pengembangan untuk membuat Rumah Sakit dengan tingkatan yg lebih rendah

misal Rumah Sakit kelas D/C agar pelayanan Kesehatan bagi masyarakat bisa terlayani di Rumah Sakit Umum Daerah.

4. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar Upaya membumikan Pancasila, UUD 1945 serta menjaga Ke Bhinekaan menjadi komitmen Bersama untuk seluruh elemen masyarakat, sehingga pesta demokrasi pemilu di tahun 2024 dapat mengesampingkan issue-isue identitas politik dan radikalisme guna mewujudkan pemilu 2024 mejadi pemilu yang Damai.
5. Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan pembangunan pasar tradisional, namun pembangunan itu tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yg pro rakyat, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang maupun manfaat bagi masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat perlu adanya kebijakan sewa kios dan ruko yang tidak memberatkan . Selain itu Fraksi PDI Perjuangan menyarankan tentang pengelolaan manajemen pasar ditinjau Kembali, pengelolaan manajemen pasar tradisional di Salatiga menjadi Perusahaan Daerah menjadi suatu keharusan.
6. Upaya peningkatan penerimaan daerah hendaknya menjadi komitmen Bersama bagi seluruh OPD dilingkungan pemerintah kota salatiga, sehingga seluruh OPD berperan sebagai OPD Penghasil. Untuk merangsang peningkatan kinerja OPD sebagai penghasil PAD, Pemerintah Kota Salatiga bisa melaksanakan kompetisi untuk setiap OPD yang kemudian memberikan reward kepada OPD yang berhasil. Disamping itu OPD yang berhubungan dengan layanan public umum bisa melayani setiap hari, dengan konsekwensi bagi petugas yang melaksanakan tugas diberikan reward atau lembur.
7. Adanya strategi penguatan dalam bidang budaya dan pariwisata, sehingga apa yang sudah dilaksanakan pemerintah kota terkait dengan penguatan budaya memerlukan Langkah dan giat yang berkesinambungan. Sebagai contoh, hak paten tumpeng koyor dan drumblek harus dibarengi dengan kegiatan maupun event-event nyata ditengah masyarakat.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Manakala nanti kami mengucapkan kata salatiga mohon hadirin semuanya menjawab dengan kata-kata Tumpang Koyor

Salatiga.....

Salatiga.....

Salatiga.....

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, semoga Tuhan Memberkati. Aom
Santi-santi – santi Aom.

MERDEKA !!!!!

Salatiga, 19 Juni 2023

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Ketua : Sarmin, S.Pd
Wk. Ketua : H. M. Kemat, S.Sos
Sekretaris : Dra. Novia Praptiningsih
Anggota : 1. Dance Ishak Palit, M.Si
 2. Bagas Aryanto, S.P
 3. Fardhila Retno Herdhini, S.E
 4. Bonar Novi Priatmoko, S.H
 5. Dwi Indah Widowati, S.Pd, M.Si

